



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

Pengungkapan manajemen risiko tidak terlepas dari teori agensi dan teori sinyal. Teori agensi menjelaskan bahwa pengungkapan manajemen risiko dapat mengurangi informasi asimetris akibat adanya perbedaan informasi yang diterima antara *agent* (pihak manajemen) dan *principal* (pemilik perusahaan) serta mengurangi konflik kepentingan antara *agent* dan *principal*. Begitu pun dengan teori sinyal yang menyatakan bahwa pengungkapan manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen dapat memberikan sinyal yang baik untuk pemilik perusahaan dan publik mengingat bahwa pemilik perusahaan dan publik tidak memiliki informasi yang mendalam seperti pihak manajemen. Berikut penjelasan mengenai teori agensi dan teori sinyal yang berhubungan dengan pengungkapan manajemen risiko.

2.1 Teori Agensi

Teori keagenan muncul sekitar tahun 1970, yaitu berawal dengan adanya bentuk pemisahan antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen yang ada di dalam perusahaan. Dengan semakin besarnya suatu perusahaan, maka akan semakin membuat rumit pemilik perusahaan, sehingga pemilik perusahaan tidak bisa mengelola atau mengontrol perusahaan dengan baik sehingga pemilik perusahaan meminta agar pihak manajemen yang ada di dalam perusahaan dapat mengelola perusahaan demi kelangsungan hidup perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Pihak manajemen di

dalam perusahaan dapat dikatakan sebagai *agent* dan pemilik perusahaan dapat dikatakan sebagai *principal*. Hubungan inilah yang banyak dikatakan oleh beberapa ahli sebagai hubungan keagenan (Tanor, 2009) dalam Rizki (2013).

Di dalam teori ini, *agent* diasumsikan sebagai individu yang rasional, memiliki kepentingan pribadi dan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Manajer sebagai *agent* bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*), namun di sisi lain manajer juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sehingga ada kemungkinan besar *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal* (Jensen,1976) dalam Wardhana (2013).

Ketika pemegang saham dan manajemen memiliki perbedaan kepentingan, maka akan memunculkan suatu konflik, yang disebut *conflict of interest*. Menurut Sambera (2013), *conflict of interest* muncul pada teori agensi saat masing-masing pihak berusaha untuk memperbesar keuntungan bagi diri mereka sendiri. *Principal* menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang mereka tanamkan pada perusahaan, sedangkan agen menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi/bonus/insentif yang memadai dan sebesar-besarnya atas kinerjanya (Sambera, 2013). Perbedaan kepentingan ini secara tidak langsung memaksa manajemen untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh pemegang saham yaitu menyajikan laporan keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan yang signifikan baik secara finansial maupun non finansial. Hal ini dikarenakan manajemen yang mengetahui informasi perusahaan secara lengkap dan manajemen dapat melakukan strategi untuk membuat laporan keuangan perusahaan

tersaji dengan baik. Menurut Prayoga (2013), manajer seringkali melakukan manipulasi saat melaporkan kondisi perusahaan kepada pemegang saham agar tujuannya mendapatkan kompensasi tercapai. Kondisi perusahaan yang dilaporkan oleh manajer tidak sesuai atau tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan perbedaan informasi yang dimiliki antara manajer dengan pemegang saham. Sebagai pengelola, manajer lebih mengetahui keadaan yang ada dalam perusahaan dari pada pemegang saham. Keadaan tersebut dikenal sebagai asimetri informasi (Prayoga, 2013).

Teori keagenan dapat digunakan sebagai dasar pemahaman dalam praktek pengungkapan risiko. Manajer sebagai pihak agen, memiliki informasi perusahaan yang lebih banyak dan lebih akurat, dibandingkan dengan *stakeholder*. Informasi tersebut mencakup seluruh kondisi perusahaan, termasuk kondisi-kondisi yang mungkin akan dihadapi perusahaan di masa datang. Pemegang saham, kreditur dan *stakeholder* lainnya memerlukan informasi-informasi tersebut untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan yang akan dilakukan (Wardhana, 2013). Menurut Utomo (2014), tujuan utama pengungkapan risiko adalah untuk mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara *agent* dan *principal*. *Principal* sangat membutuhkan informasi terkait risiko guna memperbaiki pertimbangannya dalam pengambilan keputusan. Selain itu, praktek pengungkapan risiko juga mampu menghindari perusahaan dari konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* melalui kontrol yang dilakukan *principal* kepada *agent* dengan melihat sejauh mana *agent* melakukan praktek pengungkapan risiko (Utomo, 2014).

Kemudian, menurut Mubarak (2013), dalam praktek pengungkapan risiko, teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana manajer memberikan informasi mengenai risiko kepada pemegang saham dan kreditur dengan menyediakan informasi yang reliabel atau dapat diandalkan. Dalam hal ini manajer merupakan pihak internal perusahaan yang memiliki informasi mengenai risiko sedangkan pemegang saham dan kreditur sebagai pihak eksternal perusahaan yang biasanya tidak memiliki informasi mengenai risiko. Ketersediaan informasi yang reliabel mengenai risiko oleh manajer kepada pemegang saham dan kreditur akan mengurangi masalah asimetri informasi (Mubarak, 2013).

2.2 Teori Sinyal

Teori *signal* menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Teori *signal* mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan. Teori *signal* menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak eksternal. Perusahaan atau manajer memiliki pengetahuan lebih banyak mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pihak eksternal (Nuswandari, 2009) dalam Saputro (2014). Asimetri informasi adalah keadaan yang terjadi akibat tidak seimbangannya informasi yang didapat antara manajemen dan pemegang saham serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya seperti kreditur. Manajemen adalah pihak internal yang dianggap mengetahui

informasi perusahaan dengan lebih komprehensif, sedangkan untuk pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya merupakan pihak eksternal yang tidak mengetahui informasi perusahaan secara komprehensif.

Menurut Wolk (2000) dalam Purwandari (2012), perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi asimetri informasi. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan yang positif dan dapat dipercaya yang akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan (Wolk, 2000) dalam Purwandari (2012).

Informasi keuangan yang positif dan dapat dipercaya tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Di dalam laporan keuangan mencakup informasi keuangan yang bersifat kuantitatif dan informasi keuangan yang bersifat kualitatif. Informasi keuangan yang bersifat kuantitatif adalah informasi yang dapat diukur dengan jumlah tertentu yang pada umumnya berasal dari beberapa jenis laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, yang meliputi laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Sedangkan, informasi keuangan yang bersifat kualitatif adalah informasi berupa penjelasan mengenai pos-pos yang berkaitan dengan laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas maupun informasi lainnya berupa kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, manajemen risiko, dan lainnya. Informasi yang bersifat kualitatif diungkapkan ke dalam jenis laporan keuangan yang dinamakan catatan atas laporan keuangan. Di dalam menyusun

laporan keuangannya, perusahaan harus mengungkapkan informasi yang relevan, dapat dipahami, dapat diandalkan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar dapat memberikan manfaat bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan.

Dalam praktek pengungkapan risiko perusahaan, teori sinyal dapat menjelaskan bagaimana manajer mengungkapkan informasi mengenai risiko yang dihadapi perusahaan kepada pemilik. Manajer harus memberikan informasi yang memadai (*adequate information*) mengenai risiko yang dihadapi perusahaan. Informasi mengenai risiko yang diungkapkan tersebut memberikan sinyal kepada pemilik (investor dan kreditur). Apabila manajer mengungkapkan informasi mengenai risiko secara memadai kepada pemilik maka hal tersebut merupakan sinyal baik (*good news*) bagi perusahaan. Sinyal baik (*good news*) tersebut memberikan informasi kepada pemilik bahwa perusahaan telah melakukan manajemen risiko dengan baik. Sebaliknya, apabila manajer tidak mengungkapkan informasi mengenai risiko secara tidak memadai, maka hal tersebut akan menjadi sinyal buruk (*bad news*) bagi perusahaan. Hal tersebut memberikan persepsi bahwa perusahaan tidak melakukan manajemen risiko dengan baik. Oleh karena itu, manajer harus memberikan informasi yang memadai mengenai risiko yang dihadapi perusahaan kepada pemilik. Hal tersebut dilakukan oleh manajer untuk mengamankan investasi pemilik dalam perusahaan. Selain itu, tujuan manajer mengungkapkan informasi yang memadai dalam laporan keuangan adalah untuk menyampaikan sinyal khusus kepada pengguna informasi saat ini dan pengguna potensial (Elzahar, 2012) dalam Mubarak (2013).

2.3 Pengungkapan Manajemen Risiko

Menurut Fitriana (2014), laporan tahunan merupakan media informasi yang menghubungkan komunikasi entitas bisnis dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti halnya investor, kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Laporan tahunan pada dasarnya merupakan sumber informasi bagi investor mengenai kelangsungan usaha suatu perusahaan dan juga sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen dalam mengantisipasi kondisi ekonomi yang semakin berubah. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) (Fitriana,2014).

Menurut Nugraheni (2012) dalam Fitriana (2014), pengungkapan wajib merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, seperti Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom). Peraturan mengenai pengungkapan informasi wajib dalam laporan tahunan diatur oleh Bapepom dalam Lampiran Keputusan Nomor. Kep-431/BL/2012. Bapepom yang mewajibkan bagi perusahaan *go public* untuk mengungkapkan laporan tahunan perusahaan salah satunya dengan mekanisme *corporate governance* yaitu pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan, pengungkapan sukarela adalah penyampaian informasi yang diberikan secara sukarela oleh perusahaan yang melebihi dari pengungkapan wajib. Salah satu cara yang digunakan manajemen untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela. Perusahaan bebas memilih dalam memberikan informasi yang dianggap relevan dan mendukung dalam pengambilan keputusan oleh para pemakai

laporan tahunan. Hal inilah yang menjadikan keberagaman luas pengungkapan sukarela antar perusahaan (Nugraheni,2012) dalam Fitriana (2014).

Pengungkapan manajemen risiko adalah salah satu bagian dalam pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*). Menurut Linsley (2006) dalam Saidah (2014) menyatakan bahwa perusahaan dikatakan telah mengungkapkan risiko jika pembaca laporan tahunan diberi informasi mengenai kesempatan atau prospek, bahaya, kerugian, ancaman atau eksposur yang akan berdampak bagi perusahaan sekarang maupun di masa yang akan datang. Menurut Meizaroh (2011), manajemen risiko perusahaan merupakan suatu strategi yang digunakan untuk tetap bertahan dalam lingkungan usaha yang kompetitif. Pesatnya pertumbuhan ekonomi menjadikan ERM atau *Enterprise Risk Management* sebagai bagian penting perusahaan dalam mempertahankan kinerja dan tingkat profitabilitas perusahaan.

Manajemen risiko perusahaan atau ERM menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen, *board of director*, dan personel lain dari suatu organisasi, diterapkan dalam *setting* strategi, dan mencakup organisasi secara keseluruhan, didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi suatu organisasi, mengelola risiko dalam toleransi suatu organisasi, untuk memberikan jaminan yang cukup pantas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi (Hanafi, 2009) dalam Jatiningrum (2013).

Menurut Djohanputro (2013), proses manajemen risiko terdiri dari:

1. Identifikasi

Pada tahap ini, manajemen bertugas untuk mengenali kejadian, *events*, yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategis tersebut. Termasuk di dalamnya adalah

pengenalan terhadap penyebab munculnya kejadian, dan dampaknya bila kejadian tersebut benar-benar terjadi.

2. Pengukuran atau penilaian risiko

Pada tahap ini, manajemen mengukur besar-kecilnya setiap risiko yang teridentifikasi dari proses identifikasi sebelumnya. Dengan mengukur risiko, manajemen dapat membuat kolom probabilitas dan dampak risiko.

3. Pemetaan atau respons risiko

Pada tahap ini, manajemen menetapkan berbagai respons yang sesuai dengan masing-masing risiko. Respons risiko yang telah berjalan dapat dimasukkan ke dalam kolom “Penanganan Risiko Saat Ini” dan respons risiko yang direncanakan dimasukkan ke dalam kolom “Rencana Penanganan Risiko”.

4. Penanganan

Pada tahap ini, manajemen melakukan penanganan risiko untuk menekan probabilitas atau kemungkinan dan dampak sehingga risiko bisa turun sampai ke tingkat yang dapat diterima atau ditoleransi oleh perusahaan.

5. *Monitoring*

Pada tahap ini, manajemen memonitor keseluruhan proses manajemen risiko yang berjalan. Manajemen dapat melakukan penyesuaian atau modifikasi terhadap proses yang telah diterapkan. *Monitoring* dapat dilakukan selama proses manajemen risiko berjalan, *on the spot* maupun secara terpisah.

6. Kontrol

Pada tahap ini, manajemen berkewajiban memastikan tingkat efektivitas dan efisiensi serta respons atas risiko yang telah diterapkan. Manajemen dapat

mengubah atau memodifikasi respons risiko jika manajemen menemukan cara yang lebih efektif dan efisien.

7. Pelaporan

Pada tahap ini, manajemen bertugas untuk melaporkan proses dan hasil atas manajemen risiko yang telah diterapkan.

Peraturan yang mengatur tentang pengungkapan risiko adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 60 (penyesuaian 2014) tentang instrumen keuangan: pengungkapan dalam paragraf 31 bahwa entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos pada akhir periode pelaporan. Dalam aturan tersebut, dikatakan bahwa pengungkapan yang disyaratkan memfokuskan pada risiko yang timbul dari instrumen keuangan dan bagaimana risiko tersebut dikelola. Pengungkapan risiko yang harus dilakukan lebih pada jenis dan tingkat risiko yang timbul, yang kemudian dikategorikan dalam pengungkapan kuantitatif dan kualitatif. Pengungkapan kuantitatif meliputi risiko kredit, aset keuangan yang melewati jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai, agunan dan peningkatan kualitas kredit yang diperoleh, risiko likuiditas, risiko pasar dan analisis sensitivitas, serta pengungkapan risiko pasar lainnya. Sedangkan pengungkapan kualitatif meliputi *eksposure* timbulnya risiko, tujuan, kebijakan dan proses pengelolaan risiko.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK 60 (penyesuaian 2014), risiko kredit menjelaskan tentang analisis umur aset keuangan yang lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan tetapi tidak mengalami penurunan nilai, dan analisis aset

keuangan yang ditentukan secara individual mengalami penurunan nilai pada akhir periode pelaporan, termasuk faktor yang dipertimbangkan entitas dalam menentukan penurunan nilai. Dalam risiko kredit, entitas mengungkapkan berdasarkan kelompok instrumen keuangan:

1. jumlah yang paling mewakili nilai maksimal eksposur risiko kredit pada akhir periode pelaporan tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau peningkatan kualitas kredit (*credit enhancement*) lain
2. Deskripsi agunan yang dimiliki sebagai jaminan
3. Informasi mengenai kualitas kredit yang belum jatuh tempo

Menurut Djohanputro (2013), risiko kredit merupakan risiko bahwa debitur atau pembeli secara kredit tidak dapat membayar hutang dan memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam kesepakatan, atau turunnya kualitas debitur atau pembeli sehingga persepsi mengenai kemungkinan gagal bayar semakin tinggi. Ini mengandung pengertian, risiko kredit suatu perusahaan berarti juga risiko turunnya kemampuan perusahaan debitur. Oleh karena itu, mengukur risiko kredit selalu dikaitkan dengan nilai nominal risiko dan kualitas dari risiko. Keduanya menentukan kebijakan perusahaan dalam memberikan kredit.

Menurut IAI dalam PSAK 60 (penyesuaian 2014), risiko likuiditas mengungkapkan tentang analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan nonderivatif (termasuk kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan) yang menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual, dan analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan derivatif. Analisis jatuh tempo mencakup sisa jatuh tempo kontraktual liabilitas keuangan derivatif tersebut dimana jatuh tempo kontraktual sangat penting untuk memahami

waktu arus kas. Di dalam mengungkapkan risiko likuiditas, entitas harus mengungkapkan uraian mengenai bagaimana entitas mengelola risiko likuiditas yang melekat.

Menurut Djohanputro (2013), risiko likuiditas adalah ketidakpastian atau kemungkinan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendek atau pengeluaran tak terduga. Ini berkaitan dengan pengelolaan modal kerja perusahaan. Risiko ini terjadi bila perusahaan kekurangan uang tunai atau modal kerja bentuk lain yang bisa diuangkan dengan mudah untuk membayar utang dagang, utang pajak, utang bank yang jatuh tempo, dan kewajiban jangka pendek lainnya.

Menurut IAI dalam PSAK 60 (penyesuaian 2014), risiko pasar mengungkapkan antara lain analisis sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar dimana entitas terdampak pada akhir periode pelaporan, yang menunjukkan dampak perubahan pada variabel risiko yang relevan pada tanggal tersebut terhadap laba rugi dan ekuitas. Berikut merupakan analisis sensitivitas yang diungkapkan pada bagian risiko pasar:

1. Analisis sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar
2. Metode dan asumsi yang digunakan dalam menyusun analisis sensitivitas
3. Perubahan metode dan asumsi yang digunakan pada periode sebelumnya dan alasan perubahannya
4. Jika menyusun analisis sensitivitas yang mencerminkan saling ketergantungan antar variabel risiko, maka entitas menggunakan analisis tersebut sebagai pengganti analisis dengan mengungkapkan metode, parameter, asumsi utama, keterbatasan.

Entitas menyediakan analisis sensitivitas untuk keseluruhan bisnisnya, tetapi tidak dapat menyediakan jenis analisis sensitivitas yang berbeda untuk kelas instrumen keuangan yang berbeda, yaitu:

1. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga (*interest rate risk*) timbul pada instrumen keuangan yang mengandung suku bunga yang diakui dalam laporan posisi keuangan (contohnya pinjaman yang diberikan dan piutang dan instrumen utang yang diterbitkan) dan pada beberapa instrumen laporan keuangan yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan (contohnya beberapa komitmen pinjaman yang diberikan). Menurut Djohanputro (2013), risiko suku bunga yaitu risiko yang berdampak pada potensi penyimpangan beban biaya atau pendapatan oleh karena fluktuasi suku bunga.

2. Risiko mata uang

Risiko mata uang (*currency risk* atau risiko valuta asing) timbul pada instrumen keuangan yang didenominasi dalam valuta asing, yaitu dalam mata uang selain dari mata uang fungsional dimana mata uang tersebut diukur. Untuk tujuan PSAK ini, risiko mata uang timbul dari instrumen keuangan yang merupakan item non moneter atau dari instrumen keuangan yang didenominasi dalam mata uang fungsional.

3. Risiko harga lain

Risiko harga lain (*other price risk*) timbul pada instrumen keuangan karena perubahan dalam, sebagai contoh, harga komoditas. Untuk memenuhi analisis sensitivitas, entitas mungkin mengungkapkan dampak penurunan indeks bursa saham, harga komoditas, atau variabel risiko lain tertentu.

Pada industri manufaktur tidak hanya mengungkapkan risiko keuangan saja, melainkan mengungkapkan risiko yang melekat pada industri manufaktur itu sendiri. Peraturan tersebut dijelaskan dalam Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor : SE-02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik: Industri Manufaktur. Menurut Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor : SE-02/PM/2002, karakteristik utama kegiatan industri manufaktur adalah mengolah sumberdaya menjadi barang jadi melalui suatu proses pabrikasi. Oleh karena itu, aktivitas perusahaan yang tergolong dalam kelompok industri manufaktur sekurang-kurangnya mempunyai tiga kegiatan utama yang meliputi kegiatan untuk memperoleh atau menyimpan input atau bahan baku, kegiatan pengolahan/pabrikasi/perakitan atas bahan baku menjadi barang jadi, dan kegiatan menyimpan atau memasarkan barang jadi. Lalu, di dalam Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor : SE-02/PM/2002, terdapat 11 risiko yang melekat pada perusahaan dalam kelompok industri manufaktur, yaitu sebagai berikut:

1. Risiko sulitnya memperoleh bahan baku, yang dapat disebabkan oleh:
 - a. kelangkaan bahan baku, dan
 - b. ketergantungan yang tinggi terhadap impor atau pemasok tertentu.

Menurut IAI dalam PSAK 60 (penyesuaian 2014), risiko sulitnya memperoleh bahan baku termasuk ke dalam risiko pasar yaitu risiko harga lain. Risiko harga lain berkaitan dengan harga komoditas, dimana komoditas ini biasanya digunakan oleh industri manufaktur dalam memproduksi bahan baku menjadi barang jadi.

2. Risiko berfluktuasinya nilai tukar rupiah.

Berfluktuasinya nilai tukar rupiah dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

a. Depresiasi rupiah berakibat buruk bagi perusahaan yang penjualannya mengandalkan pasar lokal dan tergantung pada bahan baku impor. Meningkatnya harga jual produk jadi yang melebihi daya beli masyarakat akan berakibat menurunnya penjualan perusahaan.

Pada sisi lain, depresiasi rupiah menguntungkan perusahaan yang mengandalkan pasar ekspor dan tergantung pada bahan baku yang pengadaannya dalam nilai tukar rupiah.

b. Apresiasi rupiah pada sisi sebaliknya, berpengaruh negatif terhadap perusahaan yang mengandalkan penjualannya pada pasar ekspor.

Menurut IAI dalam PSAK 60 (penyesuaian 2014), risiko berfluktuasinya nilai tukar rupiah termasuk ke dalam risiko pasar yaitu risiko mata uang, dimana kaitannya dengan valuta asing.

3. Risiko kapasitas produksi tidak terpakai (*idle capacity*) yang terjadi karena kurangnya daya serap pasar terhadap produk, kompetisi, perubahan teknologi, adanya restriksi pemerintah terhadap produksi barang tertentu, dan lainnya. Menurut Djohanputro (2013), risiko kapasitas produksi tidak terpakai termasuk ke dalam risiko strategi. Risiko strategi atau yang disebut juga risiko bisnis adalah kemungkinan munculnya kejadian risiko yang menyebabkan perusahaan atau unit usaha tidak mampu bersaing dengan perusahaan atau bisnis pesaing. Dengan kata lain, risiko strategi adalah risiko yang berdampak pada turunnya daya saing perusahaan, unit usaha atau produk.
4. Risiko terjadinya pemogokan atau kerusuhan (*riot*) yang antara lain dapat terjadi karena ketidakpuasan karyawan terhadap kompensasi yang diterima, kondisi

perekonomian atau kondisi politik yang tidak stabil. Menurut Djohanputro (2013), risiko terjadinya pemogokan atau kerusuhan (*riot*) termasuk ke dalam risiko operasional dengan jenis risiko sumber daya manusia. Risiko operasional adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak berfungsinya suatu sistem, sumber daya manusia, teknologi, atau faktor operasional lain.

5. Risiko kekakuan investasi yaitu karena adanya restriksi/pembatasan pemerintah terhadap investasi pada bidang tertentu. Menurut Djohanputro (2013), risiko kekakuan investasi termasuk ke dalam risiko strategi yang bersumber pada faktor eksternal. Risiko strategi yang bersumber pada faktor eksternal adalah persaingan, perubahan kondisi makro baik ekonomi, politik, sosial, dan keamanan.
6. Putusnya hak paten (*patent right*) atas formula produksi bagi perusahaan yang produknya terkait erat pada hak paten atas formula tertentu akan sangat mempengaruhi pendapatannya. Menurut Djohanputro (2013), putusnya hak paten termasuk ke dalam risiko strategi yang bersumber pada faktor internal. Faktor internal menyangkut perubahan struktur organisasi, yang juga berakibat pada mekanisme pengambilan keputusan, kelayakan sumber daya untuk mengeksekusi strategi, dan ketersediaan informasi dan teknologi untuk mendukung strategi bisnis dan korporat.
7. Risiko *leverage* (*leverage risk*) yaitu risiko-risiko yang terkait pada kewajiban perusahaan untuk membayar pinjaman atau hutang yang berasal dari luar perusahaan (*external financing*). *External financing* berasal dari obligasi maupun kredit bank. Menurut IAI dalam PSAK 60 (penyesuaian 2014), risiko *leverage* berkaitan dengan risiko pasar dengan jenis risiko suku bunga karena sumber

pendanaan dari luar perusahaan berkaitan dengan tingkat suku bunga dalam hal pengembalian pinjaman tersebut serta berhubungan dengan risiko likuiditas. Karena, menurut Djohanputro (2013), risiko likuiditas terjadi bila perusahaan kekurangan uang tunai atau modal kerja bentuk lain yang bisa diuangkan dengan mudah untuk membayar utang dagang, utang pajak, utang bank yang jatuh tempo, dan kewajiban jangka pendek lainnya.

8. Risiko pemasaran meliputi, antara lain tak terjualnya barang jadi, kerusakan dan kehilangan pada jalur distribusi dan pemasaran, habisnya daur hidup produk. Menurut Djohanputro (2013), risiko pemasaran termasuk ke dalam risiko operasional dengan jenis risiko produktivitas. Risiko produktivitas berkaitan dengan penyimpangan hasil atau tingkat produktivitas yang diharapkan karena adanya penyimpangan dari variabel yang mempengaruhi produktivitas kerja. Termasuk di dalamnya adalah teknologi, peralatan, material, dan sumber daya manusia.
9. Risiko penelitian dan pengembangan produk meliputi, antara lain biaya penelitian dan pengembangan yang gagal menghasilkan produk baru. Menurut Djohanputro (2013), risiko penelitian dan pengembangan produk termasuk ke dalam risiko operasional dengan jenis risiko proses. Risiko proses adalah risiko mengenai potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan dari proses oleh karena ada penyimpangan atau kesalahan dalam kombinasi sumber daya (sumber daya manusia, keahlian, metode, peralatan, teknologi, dan material) dan karena perubahan lingkungan. Kesalahan prosedur merupakan salah satu bentuk perwujudan risiko proses.

10. Risiko dampak usaha terhadap lingkungan yang tercermin dari peringkat analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang diberikan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) dan unjuk rasa ketidakpuasan penduduk di lingkungan setempat. Menurut Djohanputro (2013), risiko dampak usaha terhadap lingkungan termasuk ke dalam risiko kejadian eksternal dengan jenis risiko lingkungan. Risiko kejadian eksternal adalah potensi penyimpangan hasil pada eksposur korporat dan strategis, dan bisa berdampak pada potensi penutupan usaha, karena pengaruh dari faktor eksternal. Yang termasuk faktor eksternal antara lain reputasi, lingkungan, sosial, dan hukum.
11. Risiko tidak tertagihnya piutang (*accounts receivable risk*) yaitu risiko yang muncul karena rendahnya kolektabilitas piutang. Risiko ini terkait langsung pada industri manufaktur, karena sistem penjualan pada industri manufaktur umumnya tidak dilakukan secara kas. Menurut IAI dalam PSAK 60 (penyesuaian 2014), risiko tidak tertagihnya piutang termasuk ke dalam risiko kredit dimana perusahaan mendapatkan piutang dari kostumer nya dalam hal penjualan produknya.

Pengungkapan manajemen risiko perannya sangat penting dalam membentuk *good corporate governance*. Menurut (Choi, 2011) dalam Mubarak (2013), pengungkapan risiko merupakan salah satu bentuk dalam penerapan mekanisme *corporate governance*. *Corporate governance* adalah seperangkat hubungan diantara manajemen, direksi, dewan komisaris, investor dan *stakeholders* yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan. Pengungkapan risiko mendorong terwujudnya *good corporate governance* yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. *Good*

corporate governance dilakukan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (Choi, 2011) dalam Mubarak (2013).

Transparansi mengandung arti bahwa informasi penting yang perlu diketahui dan digunakan oleh pihak berkepentingan untuk membuat keputusan harus bisa diakses oleh pihak berkepentingan tersebut. Lalu, akuntabilitas berarti komitmen untuk mencapai yang terbaik bagi pihak-pihak berkepentingan. Perusahaan yang akuntabel bersedia mengubah sistem, tata nilai, dan perilaku bila hasil dan manfaat tidak sesuai dengan tuntutan pihak berkepentingan, atau pemenuhan tuntutan tidak seimbang. Kemudian, responsibilitas atau tanggung jawab adalah taat pada aturan dan hukum yang berlaku. Ketaatan tersebut berlaku baik untuk aturan internal korporasi maupun aturan eksternal, seperti peraturan asosiasi, peraturan pemerintah, dan perundangan. Selanjutnya, independensi adalah kondisi yang menunjukkan kemampuan memutuskan dan mengatur secara mandiri, *self-governing*, dan bebas dari pengaruh, tuntutan, atau kendali pihak lain dalam membuat keputusan sehingga keputusan yang dibuat semata-mata untuk kepentingan pihak berkepentingan sebaik mungkin. Terakhir, yaitu kewajaran dan kesetaraan berarti tidak adanya kecenderungan untuk mengutamakan salah satu pihak dalam keputusan dan tindakan, baik pihak internal maupun eksternal, termasuk diri sendiri (Djohanputro, 2013).

Menurut Subowo (2014) menjelaskan rumusan untuk menghitung pengungkapan manajemen risiko adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Pengungkapan Manajemen Risiko} = \frac{\text{Jumlah Pengungkapan Risiko}}{\text{Total Jenis Risiko Industri Manufaktur}} \times 100\%$$

2.4 Kepemilikan Institusi Domestik

Menurut Ririn (2011) dalam Prayoga (2013), kepemilikan institusi domestik merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management* dan kepemilikan institusi lain). Menurut Widiastuti (2012) dalam Rizki (2013), peningkatan kepemilikan institusi domestik menyebabkan kinerja manajemen diawasi secara optimal sehingga manajemen menghindari perilaku yang merugikan *principal*. Kepemilikan institusi domestik yaitu kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh instansi non-pemerintah atau biasanya berbentuk perseroan terbatas. Adanya kepemilikan institusi domestik merupakan bagian dari pemilik perusahaan, sehingga dapat berfungsi untuk memberikan pengawasan terhadap kinerja perusahaan (Widiastuti, 2012) dalam Rizki (2013).

Semakin besar persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi akan menyebabkan usaha *monitoring* semakin efektif, karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik yang dilakukan manajemen (Fathimiyah, 2012). Menurut Rustriarini (2011) dalam Rizki (2013) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan institusi domestik akan lebih memberikan pengawasan yang lebih optimal dan dapat menghalangi perilaku *opportunistic* para manajer. Kepemilikan institusi domestik juga memiliki *opportuniy* (kesempatan), *resources* (sumber daya) dan *expertise* (keahlian) untuk dapat menganalisis kinerja dan juga tindakan manajer. Jadi kepemilikan institusi domestik sebagai pemilik saham mempunyai kepentingan agar dapat membangun reputasi perusahaan yang semakin baik (Rustriarini, 2011) dalam Rizki (2013).

Menurut Prayoga (2013) menjelaskan rumusan untuk menghitung kepemilikan institusi domestik adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusi Domestik} = \frac{\sum \text{saham yang dimiliki institusi domestik}}{\sum \text{saham yang beredar}}$$

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prayoga (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara institusi domestik terhadap pengungkapan manajemen risiko. Semakin besar kepemilikan institusi domestik, maka pengawasan yang diterima perusahaan semakin besar pula. Hal tersebut membuat perusahaan akan semakin tidak dapat berbuat seenaknya atau melakukan penyelewengan-penyelewengan. Peningkatan kepemilikan institusi domestik menyebabkan pengawasan terhadap kinerja manajemen semakin optimal karena dapat mengendalikan perilaku manajemen. Dengan begitu perusahaan juga dapat dijalankan lebih efisien dan efektif dalam mengelola dan mengendalikan risiko serta menjelaskannya dalam pengungkapan manajemen risiko.

Begitu juga dengan Saidah (2014), kepemilikan institusional domestik berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Berpengaruhnya kepemilikan institusional domestik terhadap pengungkapan risiko perusahaan terjadi karena kepemilikan institusional domestik seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan instansi lainnya biasanya merupakan pemegang saham terbesar dalam perusahaan. Dengan adanya kepemilikan yang besar maka akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Salah satu bentuk pengawasan terhadap kinerja manajemen adalah dapat meminta pihak

manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi risiko dalam laporan tahunannya secara lebih detail kepada pemegang saham. Disamping itu, kepemilikan institusional domestik umumnya akan lebih memperhatikan peraturan - peraturan terkait dengan pengungkapan yang harus dilakukan oleh perusahaan jika dibandingkan dengan pemodal asing di Indonesia yang kehadirannya hanya mencari keuntungan.

Namun, hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusi domestik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko, karena pihak institusi domestik belum mempertimbangkan bahwa *risk management disclosure* merupakan salah satu kriteria dalam melakukan suatu investasi. Sehingga para *stakeholder* tersebut cenderung tidak memberikan tekanan terhadap suatu perusahaan untuk lebih detail dalam memberikan informasi mengenai *risk management disclosure* di dalam laporan tahun suatu perusahaan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputro (2014) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara kepemilikan institusi domestik terhadap *risk management disclosure*. Sehingga, pernyataan mengenai semakin besar persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi akan menyebabkan usaha *monitoring* semakin efektif, karena dapat mengendalikan perilaku *oportunistic* yang dilakukan manajemen, tidak dapat dibuktikan.

Ha₁ : Kepemilikan institusi domestik berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko

2.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diartikan besar kecilnya sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut, baik itu sumber daya modal ataupun sumber daya manusia yang dimilikinya. Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar (Sudarmadji, 2007) dalam Prayoga (2013).

Perusahaan dengan ukuran lebih besar akan lebih terlihat dan menarik perhatian dari para *stakeholder*. Perusahaan tersebut akan menganggap bahwa pengungkapan risiko sebagai cara untuk meningkatkan reputasi perusahaan melalui sistematika pengungkapan. Hal ini dilakukan dengan dasar tingkat visibilitas yang lebih besar oleh publik menyiratkan pengawasan yang lebih ketat dari pemangku kepentingan (Amran, 2009) dalam Wardhana (2013).

Menurut ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor 11/PM/1997 yang menyatakan bahwa perusahaan menengah atau kecil adalah perusahaan yang memiliki jumlah kekayaan (total asset) tidak lebih dari 100 milyar rupiah. Maka, pada penelitian ini, ukuran perusahaan diproksikan dengan *log natural* (ln) total aset.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln \text{ Total Aset}$$

Menurut Subowo (2014), perusahaan dengan ukuran besar memiliki kegiatan usaha yang lebih kompleks yang mungkin juga akan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat luas dan lingkungannya, sehingga dilakukan pengungkapan informasi yang lebih untuk menunjukkan pertanggungjawaban perusahaan kepada publik. Menurut Prayoga (2013), semakin besar perusahaan maka semakin banyak

informasi yang akan diungkapkannya. Semakin detail pula hal-hal yang akan diungkapkan seperti informasi tentang manajemen risiko perusahaan, karena perusahaan besar dianggap mampu untuk menyediakan informasi tersebut (Prayoga, 2013). Menurut Handayani (2013), ukuran perusahaan mampu mengendalikan dan mengontrol pihak manajemen. Semakin besar ukuran perusahaan yang dinyatakan dalam total aset maka tuntutan terhadap pengungkapan ERM juga akan semakin meningkat.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kristiono (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *risk management disclosure* atau pengungkapan manajemen risiko. Hasil penelitian ini berhasil mendukung teori yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil akan melakukan *risk management disclosure*. Perusahaan akan menganggap bahwa *risk management disclosure* sebagai cara untuk meningkatkan reputasi perusahaan melalui sistematika pengungkapan (Amran *et al.*, 2009). Hal ini dikarenakan permintaan pasar yang semakin berkembang yang membutuhkan informasi mengenai kondisi suatu perusahaan serta risiko yang dapat mengancam suatu perusahaan. Mengungkapkan informasi mengenai *risk management* merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik.

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM. Hal ini dikarenakan bahwa perusahaan dengan ukuran besar akan memiliki tuntutan kuat untuk mengungkapkan ERM yang bertujuan untuk transparansi publik dan identifikasi berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Menurut KPMG (2011) dalam Ardiansyah

(2014), perusahaan dengan ukuran besar umumnya cenderung untuk mengadopsi praktek *corporate governance* dengan lebih baik dibanding perusahaan kecil. Hal ini terkait dengan besarnya tanggung jawab perusahaan kepada para *stakeholder* karena dasar kepemilikan yang lebih luas. Selain itu, semakin besar perusahaan, semakin besar pula risiko yang harus dihadapinya, termasuk keuangan, operasional, reputasi, peraturan, dan risiko informasi.

Namun, hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Subowo (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan manajemen risiko. Hal ini disebabkan semakin besar nilai total *asset* suatu perusahaan, maka kegiatan perusahaan juga akan semakin kompleks, dan semakin luas pengungkapan yang dilakukan oleh suatu perusahaan maka semakin banyak informasi terpublikasi yang tidak dapat digunakan oleh perusahaan pesaing dalam mencari kesempatan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Mubarak (2013) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Hal ini disebabkan karena perusahaan, baik itu besar maupun kecil dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dihadapkan pada situasi sosial, regulasi dan lingkungan bisnis yang berbeda dalam melakukan praktek pengungkapan risiko (Hassan, 2009) dalam Mubarak (2013).

Berdasarkan penjelasan dari penelitian sebelumnya dan landasan teori yang ada, maka hipotesis alternatif untuk hubungan ukuran perusahaan dan pengungkapan manajemen risiko yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha₂ : Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko

2.6 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan tolak ukur dalam menentukan alternatif pembiayaan. Cara menilai profitabilitas perusahaan sangat tergantung pada laba dan aktivas atau modal yang akan dibandingkan dari laba yang berasal dari operasi perusahaan atau laba *netto* sesudah pajak dengan modal sendiri (Subowo, 2014).

Tingkat profitabilitas merupakan gambaran dimana perusahaan memiliki tingkat keberhasilan di dalam menghasilkan laba. Tingginya tingkat profitabilitas dapat menjadi pertimbangan bagi investor dalam melakukan investasi. Investor beranggapan bahwa dengan tingginya tingkat profitabilitas perusahaan, berarti perusahaan tersebut dapat mampu menghasilkan laba dengan semaksimal mungkin (Taures, 2011) dalam Rizki (2013). Menurut Purwandari (2012), tingkat profitabilitas bertujuan untuk mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan (Purwandari, 2012).

Pada penelitian ini, profitabilitas diproksikan dengan *net profit margin*. *Net profit margin* merupakan rasio yang mengukur persentase laba hasil penjualan setelah dikurangi seluruh biaya dan beban perusahaan, termasuk beban bunga, pajak, dan dividen saham preferen (Kieso, 2013). *Net Profit Margin* (NPM) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Kieso, 2013):

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Net Sales}}$$

Keterangan:

Net Profit Margin = Rasio margin laba bersih

Net Income = Laba bersih

Net Sales = Penjualan bersih

Semakin besar profitabilitas yang dihasilkan perusahaan, maka akan semakin luas pengungkapan risiko yang dilakukan karena menunjukkan kepada *stakeholder* mengenai kemampuan perusahaan dalam mengefisienkan penggunaan modal di dalam perusahaannya. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan akan menimbulkan ketertarikan *principal* untuk membeli saham di suatu perusahaan dan akan memiliki kontrol eksternal yang kuat sehingga hal tersebut akan mengurangi biaya keagenan (Subowo, 2014). Menurut Purwandari (2012), semakin besar profitabilitas maka akan semakin luas dalam pengungkapan laporan keuangan. Sebaliknya, semakin kecil profitabilitas maka akan semakin sempit dalam pengungkapan laporan keuangan (Purwandari, 2012). Kemudian, menurut Ruwita (2013), perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi diikuti dengan risiko yang tinggi sehingga mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi risiko yang semakin luas.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Subowo (2014), menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Semakin besar profitabilitas yang dihasilkan perusahaan, maka akan semakin luas pengungkapan risiko yang dilakukan untuk menunjukkan kepada *stakeholder* mengenai kemampuan perusahaan dalam mengefisienkan penggunaan modal di dalam perusahaannya (Subowo, 2014).

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2013) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *risk management disclosure*. Hal ini menjelaskan bahwa dengan laba yang tinggi maka perusahaan akan memiliki dana cukup untuk mengelompokkan, mengumpulkan dan mengolah informasi agar menjadi bermanfaat dan dapat menyajikan *risk management disclosure* yang lebih komprehensif. Oleh sebab itu perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi akan lebih berani untuk melakukan *risk management disclosure* atau pengungkapan manajemen risiko (Dibiyantoro, 2011) dalam Rizki (2013).

Namun, hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Doi (2014) yang menyatakan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan risiko. Menurut Aljifri (2007) dalam Doi (2014), tidak adanya hubungan negatif yang signifikan ini dikarenakan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas rendah cenderung mengalami risiko yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan tidak ingin mendapat perhatian dari *stakeholder* atas keberisikoan perusahaan, yang pada akhirnya melakukan pengungkapan risiko lebih sedikit. Selain itu, pengungkapan risiko dapat memberikan informasi yang berguna kepada pesaing, sehingga dapat mempengaruhi posisi kompetitif perusahaan dalam pasar. Pesaing akan mengetahui risiko-risiko apa saja yang sedang atau akan dihadapi perusahaan, kemudian mengambil tindakan yang mungkin akan membahayakan posisi perusahaan dalam pasar.

Berdasarkan penjelasan dari penelitian sebelumnya dan landasan teori yang ada, maka hipotesis alternatif untuk hubungan tingkat profitabilitas perusahaan dan

pengungkapan manajemen risiko yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Ha₃ : Profitabilitas perusahaan yang diproksikan dengan *net profit margin* berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko

2.7 Leverage

Leverage merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang menurut Sudarmadji (2007) dalam Fathimiyah (2012). *Leverage* adalah penggunaan aktiva perusahaan dimana untuk penggunaan tersebut, perusahaan harus menutupi dengan biaya tetap (Subowo, 2014). Biaya tetap tersebut misalnya biaya sewa dan asuransi gedung, mesin dan peralatan. Dalam menutupi biaya tetap tersebut, perusahaan menggunakan kewajiban berupa utang. Menurut Sambera (2013), perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan membuat keadaan keuangan perusahaan menjadi memburuk, hal ini disebabkan semakin besarnya pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang, jadi semakin tinggi pula risiko keuangan yang akan ditanggung oleh perusahaan.

Pada penelitian ini *leverage* diukur dengan *debt to asset ratio*. *Debt to Asset Ratio* (DAR) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan yang mampu dibiayai oleh kewajibannya. *Debt to Asset Ratio* (DAR) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Kieso, 2013):

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$$

Keterangan:

Debt To Asset Ratio = Rasio utang yang membiayai aset

Total Debt = Jumlah utang

Total Asset = Jumlah aset

Semakin besar *leverage*, maka semakin besar pula ketergantungan perusahaan kepada kreditor. Perusahaan dengan tingkat hutang yang lebih tinggi cenderung spekulatif dan berisiko. Berdasarkan teori agensi, perusahaan dengan tingkat ketergantungan terhadap kreditor yang tinggi memiliki insentif yang kuat kepada manajemen untuk mengungkapkan informasi lebih luas (Amran, 2009) dalam Wardhana (2013). Menurut Hassan (2009) dalam Ruwita (2013) menjelaskan *leverage* perusahaan berdampak pada pengungkapan manajemen risiko perusahaan. Manajer perusahaan cenderung untuk mendukung pengungkapan yang berkaitan dengan risiko ketika situasi keuangan perusahaan tidak baik. Perusahaan dengan level risiko yang lebih tinggi, akan mengungkapkan jumlah informasi yang lebih besar karena manajer perusahaan ingin untuk menjelaskan akibat dari risiko yang tinggi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utomo (2014) menunjukkan bahwa variabel *leverage* yang diproksikan oleh *debt to asset ratio* berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan risiko yang dilakukan perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi persentase perbandingan utang atas aset dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan banyaknya informasi risiko yang diungkapkan dalam *annual report*. Persentase perbandingan hutang atas aset yang tinggi menyebabkan perusahaan lebih spekulatif dan berisiko. Oleh karena itu, pengungkapan atas informasi risiko yang lebih besar dibutuhkan.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Doi (2014) menyatakan bahwa variabel *leverage* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan risiko. Dalam penelitian ini alasan yang mendasari adalah *debt ratio* menunjukkan besarnya hutang jangka panjang perusahaan yang dipakai untuk membiayai *asset* perusahaan, maka dari itu bila perusahaan mempunyai tingkat *leverage* tinggi, berarti hutangnya banyak, dan perusahaan berfikir kalau mengungkapkan *leverage* ini secara detail dan terbuka dalam pengungkapan risiko, maka pihak publik maupun investor akan berfikir bahwa kinerja perusahaan tersebut buruk, karena banyak hutang.

Namun, hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardhana (2013) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko. Hasil yang tidak signifikan pada *leverage* terhadap pengungkapan manajemen risiko kemungkinan dapat terjadi karena kreditor dapat memperoleh informasi mengenai risiko yang dihadapi perusahaan dengan mudah melalui prosedur pemberian pinjaman. Dengan demikian, perusahaan tidak harus mengungkapkannya secara luas karena kreditor sudah diberi cukup informasi mengenai risiko yang dihadapi dan antisipasi yang dilakukan oleh perusahaan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Syifa (2013) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *enterprise risk management* (ERM) atau pengungkapan manajemen risiko. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan rasio *leverage* tidak akan mempengaruhi besarnya luas pengungkapan ERM. *Leverage* yang diproksikan dengan *debt to asset ratio* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membiayai hutang dengan total aset. Perusahaan dengan hutang tinggi cenderung hati-hati dalam

melakukan aktivitasnya. Semakin tinggi proporsi hutang yang ditanggung, semakin perusahaan berusaha mengurangi aktivitas yang sifatnya tidak optimal.

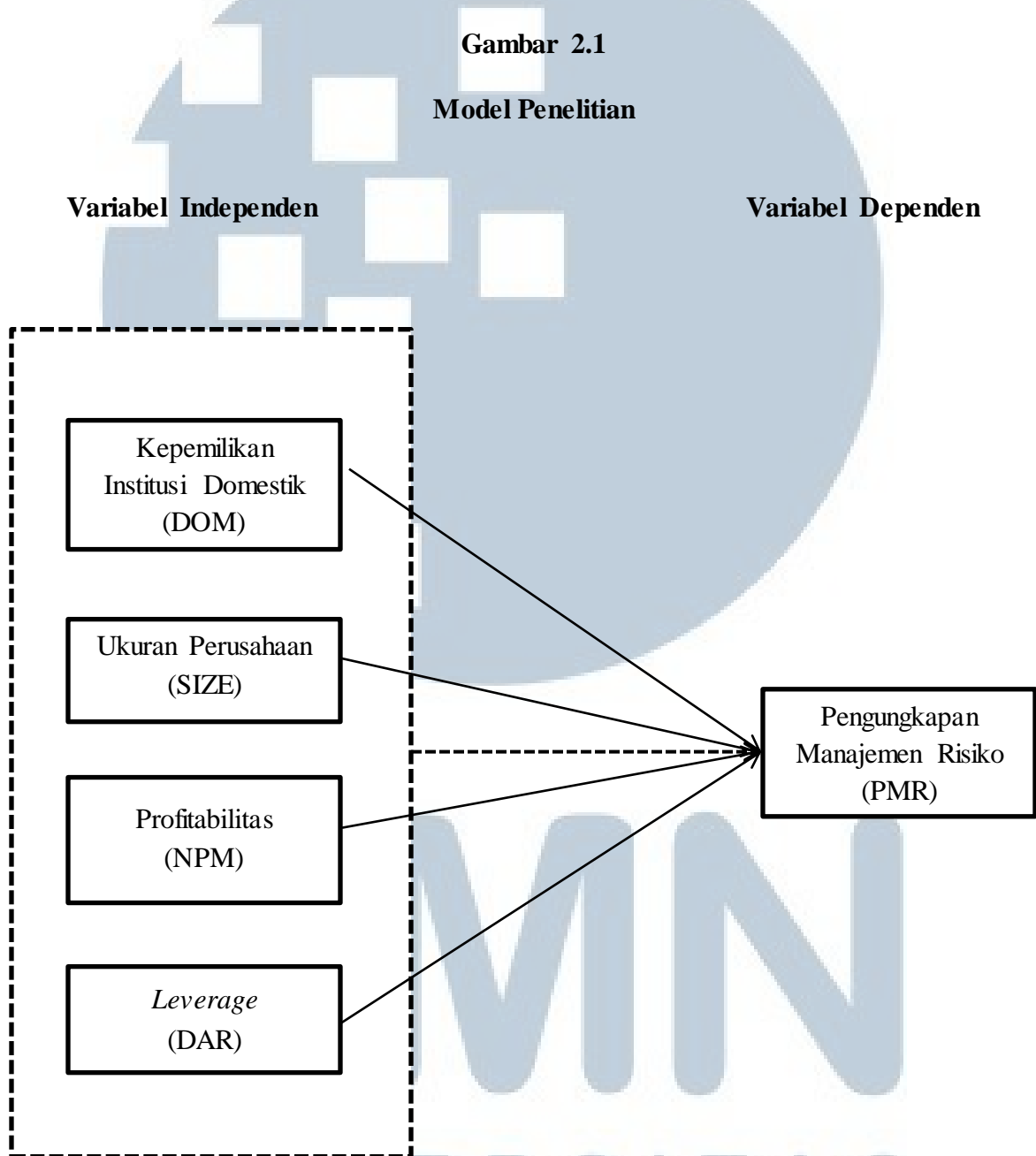
Berdasarkan penjelasan dari penelitian sebelumnya dan landasan teori yang ada, maka hipotesis alternatif untuk hubungan *leverage* dan pengungkapan manajemen risiko yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha₄ : *Leverage* yang diprosikan dengan *debt to asset ratio* berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

2.8 Model Penelitian



UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA